

**PENGARUH PENGAWASAN, AKUNTABILITAS, DAN TRANSPARANSI  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJAPEMERINTAH  
DAERAH DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL  
MODERASI**

**STUDI KASUS DI PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN**



**Skripsi Oleh :**

**DELLA TRIA MONICA**

**01031482023048**

**AKUNTANSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

**Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi**

**Studi kasus di Kabupaten Banyuasin**

Disusun Oleh :

Nama : Della Tria Monica  
NIM : 01031482023048  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian/ Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif

**Tanggal Persetujuan**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal : 24 Desember 2023**



**Rika Henda Safitri, SE,M.Acc.,Ak.,CA**

**NIP. 198705302014042001**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PENGAWASAN  
PUBLIK TERHADAP PENGELOLAAN APBD DENGAN STANDAR  
AKUNTANSI PEMERINTAH SEBAGAI PEMODERASI DI  
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**

Disusun oleh :

Nama : Della Tria Monica  
NIM : 01031482023048  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian/Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Telah diuji dalam uji komprehensif pada 15 Januari 2024 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif  
Palembang, 22 April 2024

Pembimbing



Rika Henda Safitri, SE., M.Acc., Ak  
NIP. 198705302014042001

Penguji



Drs. H. Burhanuddin, M.Acc., Ak  
NIP. 195808281988101001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi

**ASLI**  
JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI USHRI  
16/05/2024  


Arista Haikiki, S.E., M.Acc., Ak  
NIP. 197303171997031002

## SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Della Tria Monica  
NIM : 01031482023048  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian/Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya yang berjudul :

**Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Banyuasin.**

Pembimbing :

Rika Henda Safitri, SE., M.Acc., Ak

Tanggal Ujian :

17 Januari 2024

Adalah benar hasil karya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar sarjana.

Palembang, 17 Januari 2024

Membuat Pernyataan  
  
Della Tria Monica

NIM. 01031482023048

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karuniaNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin. Tidak lupa pula shalawat serta salam selalu dipanjatkan kepada junjungan umat manusia Nabi besar nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi sosok tauladan dalam menjalani kehidupan.

Dalam kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Suami saya Muhammad Libriansyah Luba, S.STP yang tercinta, karena dengan bimbingan dan dukungannya baik moril dan materil, saya dapat menyelesaikan Pendidikan Tinggi saya hingga menempuh strata 1 sampai saat ini, dan terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan kepada anak kandung saya Zahrani Alnaira Syahla, karena dengan keceriaannya sehingga membuat saya bersemangat untuk menyelesaikan Pendidikan Tinggi saya. Tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada orang tua saya, Ayahanda Indra Irhansyah dan Ibunda Suharni karena berkat doa dan restunya saya dapat menyelesaikan studi saya di Universitas Sriwijaya. Selain itu, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang membantu saya dalam penulisan Skripsi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada:

1. Yth. Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE.,M.Si, Rektor Universitas Sriwijaya periode 2023-2027
2. Yth. Prof. Dr. Mohamad Adam, M.E, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
3. Yth. Prof. Drs. Isnurhadi, M.B.A.,Ph.D, Wakil Dekan Bidang Akademik
4. Yth. Dr. Muizzuddin, SE.,M.M selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
5. Yth. Dr. Suhel, SE.,M.Si, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
6. Yth. Arista Hakiki, SE.,M.Acc.,Ak, Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
7. Yth. Dr. E. Yusnaini, SE.,M.Si.,Ak, Sekertaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

8. Yth. Rika Henda Safitri, SE., M.Acc., Ak.,CA, Dosen Pembimbing Akademik
9. Yth. Rika Henda Saftri, SE.,M.Acc.,Ak.,CA, Dosen Pembimbing Skripsi
10. Yth. Drs. H. Burhanuddin, M.Acc.,Ak, Dosen Penguji Seminar Proposal Skripsi
11. Yth. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi
12. Yth. Seluruh Staff Pegawai Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi. Terkhusus kepada Pak Madi
13. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin, Responden Skripsi

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan memudahkan dalam melaksanakan kewajiban. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, di dalamnya masih terdapat kekurangan baik dalam teknik penyajian materi muatan, maupun pembahasan masalah. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun serta bermanfaat bagi Penulis dalam tulisan-tulisan ilmiah yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan akuntansi sektor publik khususnya.

Palembang, Desember 2023

Penulis,



Della Tria Monica

## ABSTRAK

# PENGARUH PENGAWASAN, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Banyuasin)

Oleh :

**Della Tria Monica**

Pemerintah dikatakan berhasil jika mampu mengelola pemerintahannya secara efektif sehingga memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakatnya. Kinerja instansi pemerintah sangat terkait dengan pengawasan, akuntabilitas, transparansi, dan komitmen organisasi. Memperkuat sistem akuntabilitas memerlukan manajemen kinerja yang efisien. Implementasi berbagai peraturan yang ada terkait dengan konsep akuntabilitas, pengawasan, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat menghasilkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan pro-rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Penelitian berlokasi di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Variabel dalam penelitian ini adalah pengawasan, akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan daerah, komitmen organisasi dan kinerja pemerintah daerah. Populasi pada penelitian ini ialah pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di pemerintah Kabupaten Banyuasin yang berjumlah 130 pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Tenaga Harian Lepas (THL), dengan sampel penelitian sebanyak 33 responden dengan menggunakan *probability sampling*. Sumber data pada penelitian ini ialah sumber data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden dengan skor skala interval. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa ada pengaruh positif signifikan antara Pengawasan, Akuntabilitas, Transparansi dan Komitmen Organisasi secara simultan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Kemudian secara parsial, variabel Pengawasan, Akuntabilitas, Transparansi dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah berpengaruh positif. Namun, Komitmen Organisasi sebagai variabel moderasi tidak dapat memperkuat pengaruh variabel independen terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

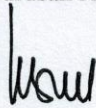
**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Transparansi, Kinerja Pemerintah Daerah, Komitmen Organisasi.

Pembimbing



Rika Henda Safitri, SE., M.Acc., Ak  
NIP. 198705302014042001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak  
NIP. 197303171997031002

## ABSTRACT

### **PENGARUH PENGAWASAN, AKUNTABILITAS DAN TRASPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Banyuasin)**

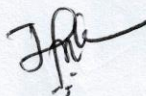
By :

**Della Tria Monica**

*The government is considered successful if it can effectively manage its administration to provide welfare to the entire society. The performance of government agencies is closely related to supervision, accountability, transparency, and organizational commitment. Strengthening the accountability system requires efficient performance management. The implementation of various regulations related to the concepts of accountability, supervision, and transparency in financial management is expected to produce good governance at the local government level that is pro-people. This research aims to determine the effect of supervision, accountability, and transparency of regional financial management on the performance of local governments with organizational commitment as a moderating variable in Banyuasin Regency Government. This study uses a survey method with a descriptive and verificative approach. The research is located at the Regional Financial Management and Asset Agency of Banyuasin Regency Government, South Sumatra Province. The variables in this study are supervision, accountability, transparency of regional financial management, organizational commitment, and performance of local governments. The population in this study is employees at the Regional Financial Management and Asset Agency (BPKAD) in Banyuasin Regency Government, totaling 130 Civil Servants (ASN) and Non-Civil Servant Employees (THL), with a sample of 33 respondents using probability sampling. The data source in this study is primary data collected through questionnaires distributed to respondents with interval scale scores. The results of this study reveal that there is a significant positive influence between Supervision, Accountability, Transparency, and Organizational Commitment simultaneously on the Performance of Local Governments. Then, partially, the variables of Supervision, Accountability, Transparency, and Organizational Commitment to the Performance of Local Governments have a positive effect. However, Organizational Commitment as a moderating variable cannot strengthen the influence of independent variables on the Performance of Local Governments.*

**Keywords:** *Accountability, Transparency, Performance of Local Governments, Organizational Commitment.*

Advisor



Rika Henda Safitri, SE., M.Acc., Ak  
NIP. 198705302014042001

Acknowledge,  
Head of Accounting Department



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak  
NIP. 197303171997031002



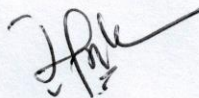
## SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Kami dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstrak skripsi dalam Bahasa Inggris dari mahasiswa:

Nama : Della Tria Monica  
NIM : 01031482023048  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian/Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Judul Skripsi : Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Di Pemerintah Kabupaten Banyuasin)

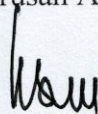
Telah kami periksa cara penulisan, Grammar, maupun susunan tenses-nya dan kami setuju untuk disampaikan pada lembar abstrak.

Pembimbing



Rika Henda Safitri, SE., M.Acc., Ak  
NIP. 198705302014042001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak  
NIP. 197303171997031002

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### **Data Diri**

Nama : Della Tria Monica  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 12 Mei 1998  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Kolonel Wahid Udin RT.15 RW.01  
Serasan Jaya, Sekayu, Musi Banyuasin  
Email : [dellatriam12@gmail.com](mailto:dellatriam12@gmail.com)

### **Pendidikan Formal**

2006 – 2010 : SD Kartika II-2 Palembang  
2010 – 2013 : SMP Negeri 9 Palembang  
2013 – 2016 : SMA Negeri 2 Sekayu  
2016 – 2019 : Program Pendidikan Vokasi Jurusan Akuntansi  
Universitas Indonesia  
2020 – 2023 : S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

### **Pengalaman Organisasi**

Himpunan Mahasiswa Vokasi Akuntansi Universitas Indonesia (HMVA UI)  
Keluarga Mahasiswa Sriwijaya Universitas Indonesia (KEMAS UI)

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Rumusan Masalah .....	13
1.2 Tujuan Penelitian.....	14
1.3 Manfaat penelitian .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
2.1 Landasan Teori.....	15
2.1.1 Agency Teori .....	15
2.1.2 Pengertian Pengawasan .....	16
2.1.3 Laporan Keuangan Daerah.....	20
2.1.4 Akuntabilitas .....	22
2.1.5 Transparasi .....	25
2.1.6 Keuangan Daerah.....	26
2.1.7 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	33
2.1.8 Komitmen Organisasi.....	35
2.2 Penelitian Terdahulu.....	39
2.3 Kerangka Pemikiran .....	45
2.4 Pengembangan Hipotesis.....	45
2.4.1 Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah .....	45
2.4.2 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah .....	46
2.4.3 Pengaruh Transparasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.....	47
2.4.4 Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.....	47
2.4.5 Komitmen Organisasi Memperkuat Pengaruh Hubungan Pengawasan , Akuntabilitas, dan Transparasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>49</b>
3.1 Rancangan Penelitian .....	49
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	50
3.3 Objek Penelitian .....	50
3.4 Pendekatan Penelitian.....	50
3.5 Definisi dan Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	51
3.5.1 Variabel Dependen.....	51

3.5.2	Variabel Independen .....	52
3.5.3	Variabel Moderasi .....	63
3.6	Populasi & Sampel Penelitian .....	64
3.6.1	Populasi.....	64
3.6.2	Sampel Penelitian.....	64
3.6.3	Teknik Sampling .....	65
3.7	Sumber & Teknik Pengumpulan Data.....	66
3.7.2	Teknik Pengumpulan Data .....	67
3.8	Metode Analisis Data .....	71
3.8.1	Transformasi Data Ordinal menjadi Data Interval .....	72
3.8.2	Uji Reliabilitas.....	73
3.8.3	Uji Asumsi Klasik.....	74
3.8.4	Uji Hipotesis.....	75
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>78</b>
4.1	Hasil Penelitian.....	78
4.1.1	Deskripsi Responden.....	78
4.1.1	Pengujian Validitas dan Realibilitas Instrumen.....	84
4.1.2	Uji Asumsi Klasik.....	88
4.1.3	Uji Statistik Deskriptif .....	89
4.1.4	Uji Normalitas Data.....	89
4.1.5	Uji Multikolinearitas .....	91
4.1.6	Uji Heterokedastisitas.....	91
4.2	Pengujian Hipotesis .....	93
4.2.1	Uji Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ).....	93
4.2.2	Uji F Statistik (Uji F Simultan) .....	94
4.2.3	Hasil Pengujian Hipotesis .....	94
4.3	Pembahasan Hasil Penelitian.....	97
4.3.1	Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.....	97
4.3.2	Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.....	98
4.3.3	Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.....	98
4.3.4	Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah .....	99
4.3.5	Pengaruh Komitmen Organisasi dalam Memoderasi Variabel Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.....	100
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>101</b>
5.1	Kesimpulan .....	101
5.2	Saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>.....</b>	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>.....</b>	<b>106</b>

## DAFTAR TABEL

1.1 Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Banyuasin Untuk tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 .....	3
1.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Banyuasin.....	4
2.1 Ikhtisar Penelitian-penelitian Terdahulu .....	37
3.1 Operasionalisasi Variabel Independen Pengawasan Keuangan Daerah (X1).....	52
3.2 Operasionalisasi Variabel Independen Akuntabilitas (X2).....	55
3.3 Operasionalisasi Variabel Independen Transparansi (X3).....	56
3.4 Operasionalisasi Variabel Independen Komitmen Organisasi (M) .....	58
3.5 Operasionalisasi Variabel Independen Kinerja Pemerintah Daerah (Y).....	59
3.6 Skor Skala Interval.....	64
3.7 Pedoman Kategorisasi Pengawasan Keuangan Daerah .....	65
3.8 Pedoman Kategorisasi Akuntabilitas .....	66
3.9 Pedoman Kategorisasi Transparansi .....	66
3.10 Pedoman Kategorisasi Komitmen Organisasi.....	67
3.11 Pedoman Kategorisasi Kinerja Pemerintah Daerah .....	68
4.1 Pengembalian Kuesioner .....	77
4.2 Pertanyaan Kuesioner Variabel Pengawasan.....	78
4.3 Pertanyaan Kuesioner Variabel Akuntabilitas .....	78
4.4 Pertanyaan Kuesioner Variabel Transparansi .....	79
4.5 Pertanyaan Kuesioner Variabel Komitmen Organisasi .....	80
4.6 Pertanyaan Kuesioner Variabel Kinerja Pemerintah Daerah.....	81
4.7 Uji Validitas variabel Pengawasan .....	84
4.8 Uji Validitas Variabel Akuntabilitas.....	84
4.9 Uji Validitas Variabel Transparansi.....	85
4.10 Uji Validitas Variabel Moderasi Komitmen Organisasi .....	86
4.11 Uji Validitas variabel Kinerja Pemerintah Daerah .....	87
4.12 Hasil Uji Reabilitas X1, X2, Z dan Y .....	87
4.13 Statistik Deskriptif .....	88
4.14 Hasil Pengujian Normalitas .....	89
4.15 Uji Multikolinearitas .....	91
4.16 Uji Heterokedastisitas .....	93
4.17 Uji Goodness of Fit.....	94
4.18 Uji Statistik F.....	94
4.19 Hasil Uji Regresi .....	95

## DAFTAR GAMBAR

2.2 Kerangka Pemikiran .....	42
4.1 Grafik Regresi P-Plot.....	90
4.2 Grafik Scatterplot.....	93

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Organisasi sektor publik yang semakin pesat menuntut pemerintah agar melakukan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Pemberian otonomi dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Kabupaten/Kota membawa konsekuensi perubahan pada pola dan system pengawasan yang mendasar dengan diberinya keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Kinerja pemerintah dikatakan baik dapat dilihat dari tingkat pencapaian hasil yang dilaksanakan secara nyata dan maksimal. Kinerja suatu organisasi yang telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian hasil tertentu, harus sesuai dengan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas yang harus dipertanggungjawabkan (Yanuarisa, 2020). Untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program berhasil atau tidaknya diperlukan pengukuran kinerja sebagai alat ukur. Pengukuran kinerja membantu pejabat pemerintah daerah dalam menentukan tingkat pencapaian tujuan dan membantu warga untuk mengevaluasi apakah tingkat pelayanan yang diberikan pemerintah setara dengan uang yang mereka keluarkan untuk pelayanan tersebut (Ihyaul, 2017). Pemerintah dikatakan mempunyai kinerja baik apabila pemerintah tersebut mampu mengelola pemerintahan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan. Kinerja instansi pemerintah berkaitan erat dengan pengawasan, akuntabilitas, transparansi. Memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang baik. Penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada rakyat. Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah (Wiguna et al., 2015).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2023), pengelolaan berasal dari kata kelola yang memiliki arti sebagai proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan organisasi dalam rangka penertiban, pemeliharaan, pengaturan serta sistematika sumber- sumber yang ada dalam organisasi.

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan Pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut: “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut” Pengertian lain menurut Halim (Pusdiklatwas BPKP, 2007: 330) mengungkapkan “pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah” (Halim., 2007).

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Maka dari itu keuangan daerah merupakan objek yang sangat vital dalam kepentingan daerah.

Isu tentang kinerja keuangan pemerintah daerah dewasa ini menjadi sorotan publik karena belum menampakkan hasil yang baik dan belum dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Masyarakat menuntut pemerintah daerah mempunyai kinerja keuangan yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai perwujudan konsep otonomi daerah. (Mahsun et al., 2017) mengatakan bahwa: “kinerja itu sendiri adalah kemampuan kerja



yang ditunjukkan dengan hasil kerja”. Pemerintah dapat dikatakan mempunyai kinerja keuangan yang baik apabila pemerintah tersebut mampu mengelola pemerintahan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan.

Salah satu tolok ukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam perolehan pendapatan. Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Banyuasin 2020 – 2022 menunjukkan adanya tren peningkatan. Seperti yang disajikan pada tabel 1.1 tentang realisasi anggaran pendapatan Kabupaten Banyuasin di bawah ini.

**Tabel 1.1 Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Banyuasin**

**Untuk tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2020**

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	REALISASI 2020
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	2.253.437.909,341,35	2.285.916.391.667,40	2.512.676.093.933,00	2.354.400.104.267,02	2.224.006.629.416,73
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	291.522.013.227,45	228.458.786.718,56	272.484.563.536,13	253.697.193.763,03	202.831.102.396,12
4.1.1	Pajak Daerah	164.890.415.000,00	139.364.973.040,45	177.250.000.000,00	158.833.853.945,00	122.948.849.438,59
4.1.2	Retribusi Daerah	11.946.700.000,00	7.872.913.175,00	18.460.125.000,00	11.310.572.345,00	16.592.020.765,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	7.837.457.900,45	7.837.457.900,45	8.587.909.000,00	8.564.519.000,00	6.627.460.649,72
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	74.239.440.324,00	73.383.442.591,66	66.186.468.731,63	74.308.248.009,33	61.820.043.525,01
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	1.966.673.043.976,90	1.908.561.208.248,92	2.105.088.262.098,87	1.970.639.217.746,19	1.894.980.932.082,61
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.731.909.723.747,00	1.755.077.427.428,00	1.849.974.396.274,00	1.738.887.477.896,00	1.735.334.024.073,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	1.406.935.983.749,00	1.410.595.299.000,00	1.360.053.765.274,00	1.449.577.867.500,00	1.494.731.263.873,00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	27.300.175.000,00	27.300.175.000,00	0,00	0,00	34.013.249.000,00
4.2.1.5	Dana Desa	297.673.965.000,00	297.181.952.634,00	289.920.631.000,00	289.310.409.776,00	286.569.512.200,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	194.763.320.229,90	154.483.781.815,92	255.093.866.184,87	231.131.740.049,19	159.646.907.186,61
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	104.307.237.229,90	102.713.894.125,92	124.291.003.016,00	118.630.933.541,29	94.701.109.236,01
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	90.456.083.000,00	51.769.887.690,00	130.795.863.168,79	113.100.806.505,90	64.977.737.951,60
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>		147.896.395.725,00	126.122.267.938,00	131.203.872.758,00	126.205.514.955,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	51.814.220.894,00	35.207.095.725,00	8.544.367.938,00	9.886.002.000,00	0,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	116.426.631.252,00	112.689.540.000,00	126.578.900.000,00	121.397.270.668,00	126.205.514.955,00
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	2.577.244.256.991,44	2.337.816.297.622,20	2.901.296.097.810,00	2.366.665.418.753,61	2.580.704.826.963,61
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1.584.432.919.541,42	1.472.689.798.067,58	1.586.521.000.000,00	1.461.946.968.972,73	1.487.241.259.630,04
5.1.1	Belanja Pegawai	773.493.202.666,06	761.264.958.731,20	811.110.332.067,00	759.387.609.273,05	778.151.769.580,80
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	618.590.082.866,81	575.041.382.181,71	631.310.453.709,00	588.121.704.500,32	588.919.199.812,75
5.1.3	Belanja Bunga	22.015.097.866,55	16.328.981.316,77	20.000.835.233,00	19.794.060.889,20	6.071.287.122,86
5.1.5	Belanja Hibah	129.504.629.353,00	119.418.941.927,90	93.888.468.223,00	84.475.004.330,16	94.093.033.113,63
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	915.875.000,00	642.525.000,00	168.000.000,00	167.790.000,00	0,00
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>					502.776.915.571,29
5.2.1	Belanja Modal Tanah	180.000.000,00	0,00	82.674.029.979,00	72.033.703.381,00	11.171.619.758,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.780.882.199,45	61.883.265.493,00	51.947.960.819,00	47.246.012.396,05	86.918.497.243,95
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.662.866.070,00	40.940.707.920,36	283.904.681.661,00	268.313.641.185,02	45.916.787.731,32
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	473.393.889.107,00	311.553.398.086,36	10.328.596.336,00	10.249.743.734,00	01.459.375.370,01
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.364.591.556,00	11.042.996.182,00	91.500.886.309,00	5.127.559.200,00	17.261.255.446,00

Sumber: BPKAD Pemerintah Kabupaten Banyuasin (<https://bpkad.banyuasinkab.go.id>)

Namun demikian, tren peningkatan penerimaan pendapatan tersebut belum mampu meningkatkan rasio kemandirian keuangan, sebagai salah satu indikator kinerja keuangan Kabupaten Banyuasin sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 1.2.

**Tabel 1.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Banyuasin**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Kategori
2020	202,820,182,399	1,735,334,024,873	12%	Sangat Rendah
2021	228,458,786,719	1,755,077,427,428	13%	Sangat Rendah
2022	253,097,193,764	1,738,887,477,696	14%	Sangat Rendah

Sumber: BPKAD Pemerintah Kabupaten Banyuasin, 2022 (<https://banyuasinkab.go.id>)

Berdasarkan tabel 1.2 tergambar bahwa masih rendahnya rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Banyuasin yang menunjukkan bmasih sangat dibutuhkan adanya strategi dan kesamaan langkah dari semua pihak untuk dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat dijadikan strategi peningkatan kemandirian keuangan sebagai salah satu indikator kinerja keuangan daerah.

Pemerintah daerah sebagaimana dijelaskan dalam *Stewardship theory* merupakan pengelola keuangan selaku *steward* dipandang sebagai suatu unsur yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai kepentingan publik. *Steward* melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat dalam merencanakan dan melaksanakan apa yang diamanahkan kepadanya. Pengelola keuangan akan bekerja dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan principal yaitu masyarakat dan instansi mereka. Pengelolaan keuangan daerah di masing - masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu dilakukan secara cermat guna dapat menyelesaikan kendala - kendala akuntansi dan dapat melakukan penyajian informasi keuangan secara memadai. (Mardiasmo, 2018) menegaskan: “bahwa sistem pertanggungjawaban keuangan suatu institusi dapat berjalan dengan baik, bila terdapat mekanisme pengelolaan keuangan yang baik pula”

Dari paragraf di atas, berarti pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki posisi strategis dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang akuntabel. APBD sendiri juga tidak bisa terlepas dari Pendapatan Daerah yang terdiri Dana Alokasi Umum yang dapat mempengaruhi Sumber Pendapatan Asli Daerah

(Ramadhan et al., 2020). Di samping Belanja Daerah sehingga pengelolaan APBD menjadi suatu kerangka yang utuh yang terbungkus dalam akuntabilitas, transparansi dan pengelolaan keuangan yang baik sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengukuran kinerja pemerintah daerah memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas dan transparansi. Untuk memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang baik. Pemahaman mengenai konsep kinerja organisasi publik dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu melihat kinerja organisasi publik dari perspektif birokrasi itu sendiri, dan melihat kinerja organisasi publik dari perspektif kelompok sasaran atau pengguna jasa organisasi publik. Khusus mengenai organisasi publik berkaitan erat dengan produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas, serta persamaan pelayanan (Mardiasmo, 2018).

Penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada rakyat. Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

*Stewardship theory* memandang manajemen sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik. pada umumnya maupun *stakeholders* pada khususnya. Manajer dalam hal ini pengelola keuangan akan berperilaku sesuai kepentingan bersama dan ketika kepentingan *steward* dan pemilik tidak sama, maka *steward* akan berusaha bekerjasama dari pada menentangnya.

Perilaku *steward* dan pemilik di paragraf di atas disebabkan karena *steward* merasa bahwa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku principal merupakan pertimbangan yang rasional serta *steward* akan melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki banyak informasi dan bertanggungjawab atas kepercayaan yang telah diberikan rakyat, memiliki kesadaran untuk terus mewujudkan

transparansi dan akuntabilitas.

Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam setiap pekerjaan, sebab dengan adanya pengawasan yang baik maka sesuatu pekerjaan dapat berjalan lancar dan dapat menghasilkan suatu hasil kerja yang optimal. Semakin lancar kerja dan disertai pengawasan yang baik maka pekerjaan itu akan berhasil dengan baik. Adanya pengawasan yang baik dapat mendorong pegawai lebih giat dalam bekerja dan menghasilkan kerja yang baik pula terlebih apabila menyelesaikan pekerjaannya dengan semangat yang baik.

Di satu sisi akuntabilitas sangat diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik (Ihyaul, 2017).

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi Amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Pusdiklatwas, 2007).

Akuntabilitas publik adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Laporan keuangan pemerintah harus menyediakan informasi yang dapat dipakai oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintahan dalam membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik. Akuntabilitas diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut.

Berdasarkan paragraf di atas maka dibutuhkan juga pihak ketiga yang *accountable* untuk memberikan penjelasan atau alasan yang masuk akal

terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan dan hasil usaha yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas dan pencapaian suatu tujuan tertentu. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya.

Selain akuntabilitas diperlukan juga transparansi dalam kinerja pemerintah. Selain itu tuntutan sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan informasi terhadap masyarakat dalam rangka memenuhi hak-hak publik dalam halnya pengelolaan anggaran. Transparansi dapat diartikan memberikan informasi yang terbuka, yang sesuai dan jujur kepada publik sesuai dengan perundang-undangan. Menurut (I. Chandra et al., 2022).

Transparansi pengelolaan keuangan pemerintahan daerah merupakan tuntutan publik yang harus direspon secara positif. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual. Permasalahan yang berhubungan dengan kinerja pemerintah daerah adalah buruknya kinerja pelayanan publik. Keluhan masyarakat beberapa tahun terakhir yang berkaitan dengan penyimpangan penyelenggaraan pelayanan publik yang menduduki peringkat pertama masih keluhan mengenai kinerja pemerintah daerah.

Dengan pengaruh-pengaruh yang bisa ditimbulkan oleh pengawasan, akuntabilitas dan transparansi juga diperlukan komitmen organisasi yang harus dilakukan. Komitmen organisasi adalah dorongan dari dalam individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan dengan kepentingan sendiri (Turalaki et al., 2017). Komitmen organisasi diperlukan sebagai salah satu indikator kinerja karyawan. Karyawan dengan komitmen yang tinggi dapat diharapkan akan memperlihatkan kinerja yang optimal.

Seseorang yang bergabung dalam organisasi di sebuah perusahaan dituntut adanya komitmen dalam dirinya. Sebagai definisi yang umum. (Rahmawati & Asmin, 2021) mengartikan komitmen organisasional sebagai

sikap yang menunjukkan “loyalitas” karyawan dan merupakan proses berkelanjutan bagaimana seorang anggota organisasi mengekspresikan perhatian mereka kepada kesuksesan dan kebaikan organisasinya.

Komitmen mencakup juga keterlibatan kerja. Keterlibatan kerja dengan komitmen organisasi sangat erat hubungannya. Keterlibatan kerja sebagai derajat kemauan untuk menyatukan dirinya dengan pekerjaan, menginvestasikan waktu, kemampuan dan energinya untuk pekerjaan, dan menganggap pekerjaannya sebagai bagian utama dari kehidupannya. Komitmen dari karyawan merupakan sesuatu yang penting. Karena dampaknya antara lain terhadap keterlambatan, ketidakhadiran, keinginan untuk pindah kerja, dan perputaran tenaga kerja.

Manajer merupakan orang yang bertanggungjawab atas organisasi atau unit yang dipimpinnya. Tugas manajer dapat digambarkan dalam kaitannya dengan berbagai “peran” atau serangkaian perilaku yang terorganisir yang diidentifikasi dengan suatu posisi (Sopiah., 2018). Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan/kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan UU 33 tahun 2004 pasal 66 ayat 1, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Perubahan mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan wujud dari adanya tuntutan publik terhadap akuntabilitas dan transparansi manajemen pemerintahan, salah satunya adalah terkait dengan manajemen keuangan negara maupun daerah.

Perubahan mendasar dalam penyusunan laporan keuangan daerah merupakan wujud dari adanya tuntutan publik terhadap akuntabilitas dan transparansi manajemen pemerintahan, salah satunya adalah terkait dengan manajemen keuangan negara maupun daerah. (Risdiyanti Nur Solikhah, 2016), menegaskan tuntutan publik akan pemerintahan yang baik memerlukan adanya perubahan paradigma dan prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah,

baik pada tahap penganggaran, implementasi maupun pertanggungjawaban. Hal ini menandakan perubahan paradigma penyusunan keuangan daerah merupakan suatu tuntutan yang perlu direspon oleh pemerintah, karena perubahan tersebut mengakibatkan manajemen keuangan daerah menjadi semakin kompleks.

Korupsi dilakukan oleh oknum kepala desa di Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Dirinya ditahan karena diduga melakukan korupsi dana desa Tahun 2019. Akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian hingga Rp378.856.500. "Pengadaan penampungan air bersih yang harusnya sebanyak 393 unit," katanya. "Namun hanya dibelikan tersangka hanya 220 unit, jadi 173 unit di *mark up* tersangka," bebarnya. Selain itu, terdapat kekurangan volume terhadap pembangunan box culvert dari anggaran dana desa tahun 2019. (Harian Banyuasin, Jumat 21 Juli 2023).

Kemudian korupsi yang dilakukan oleh pejabat dinas pertanian dan hortikultura. Para tersangka diduga melakukan dugaan korupsi program Serasi di Banyuasin, dengan anggaran dari Kementerian Pertanian senilai Rp335 miliar. Untuk dugaan modus korupsi diduga dilakukan ketiganya, yakni markup pengadaan pompa air. Kemudian, dugaan markup mobilisasi alat berat untuk pembukaan lahan pertanian di Kabupaten Banyuasin. Selanjutnya, dugaan melakukan pungutan-pungutan terhadap kelompok tani. Serta dugaan membuat laporan pertanggungjawaban atau LPJ fiktif. (Harian Banyuasin, 13 Desember 2022).

Dari kasus – kasus di atas mengindikasikan bahwa dalam proses penggunaan dana, tidak ada pertanggungjawaban dan transparansi yang jelas yang menyebabkan pengawasan keuangan pemerintah daerah semakin melemah. Penerapan transparansi di setiap perangkat daerah diduga belum maksimal. Hal ini disebabkan banyak akses internet yang tidak dapat digunakan oleh masyarakat, sehingga ketika masyarakat membutuhkan informasi tersebut masyarakat harus ke kantor terlebih dahulu. Meningkatkan kinerja pemerintah dengan baik dengan melakukannya keterbukaan informasi yang relevan maupun akurat.

Pemerintahan yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Dikatakan transparan apabila dalam penyelenggaraan pemerintahannya mudah diakses atau diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa memantau sekaligus mengevaluasi kinerja pemerintah. Langkah yang diambil untuk Open Government Indonesia (OGI) adalah dengan melanjutkan upaya untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif, dan inovatif sehingga dalam kinerja pemerintah diharapkan meningkat, (Yessy Mayasari, Bidang Sekretariat).

Kurangnya pertanggungjawaban pemerintah dalam setiap anggaran dan realisasi yang dicapai dalam setiap kegiatan. Pemerintah selalu memberikan penjelasan di masyarakat yang tidak masuk akal atau sulit dicerna oleh masyarakat. Masyarakat kurang yakin atas pendapat yang diberikan oleh pemerintah setempat, sehingga membuat masyarakat tidak puas atas pertanggungjawaban yang diberikan pihak pemerintah atas kegiatan yang diselenggarakan dengan anggaran dana yang tidak terhitung nilainya. (Yessy Mayasari, Bidang Sekretaria).

Penelitian sejenis ini pernah dilakukan oleh (Ismi dkk, 2022) hasil penelitian ini adalah pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Pengawasan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian dari (Afifuddin M.A. et al., 2021) menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah Kabupaten Boyolali. Sama halnya dengan penelitian dari (Turalaki et al., 2017) yang menyebutkan bahwa Pengawasan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan semakin baik tingkat pengawasan keuangan daerah maka akan semakin baik pula kinerja pemerintah daerah.



Penelitian dari (Lestari, 2020) menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, namun berbeda dari Penelitian (Amali & Suwandi, 2021) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pelayanan di dinas pendapatan Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian dari (Putra & Indraswarawati, 2021) menunjukkan bahwa transparansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, sedangkan penelitian dari (Benawan et al., 2018) menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah dan transparansi pengelolaan keuangan tidak berpengaruh terhadap di kabupaten Kebumen.

Atas komitmen organisasi terdapat beberapa hasil penelitian oleh (Imanni & Witjaksono, 2018) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan dengan komitmen organisasi sebagai variable moderasi. Penelitian ini tidak sejalan dengan (Andika, 2019) yang menyatakan bahwa Komitmen organisasi tidak dapat memoderasi kinerja pemerintah daerah.

Sejak tahun 2006, yaitu sejak ditetapkannya Kepmendagri 13/2006 tentang tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD yang mengacu pada PP 58/2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hingga sekarang pemerintah daerah di seluruh Indonesia telah dan sedang mengimplementasikan model struktur kekuasaan (otoritas) baru dan rancangan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang juga baru.

Sebab dengan peraturan dari paragraf di atas, pemerintah daerah diwajibkan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja yaitu APBD yang penyusunannya harus dengan model anggaran partisipatif. Dengan model APBD berbasis kinerja, struktur

kekuasaan (otoritas) penyusunan APBD tidak hanya bergantung pada Kepala Daerah (model terdahulu tersentralisasi), bahkan harus didasarkan pada kekuasaan (otoritas terdesentralisasi) yang lebih bawah, yaitu pimpinan Badan, Dinas, Kantor, dan unit-unit lainnya.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari jurnal yang ditulis oleh (Amali & Suwandi, 2021) yang berjudul Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah studi kasus pada Kabupaten Kebumen. Perbedaan penelitian ini dengan jurnal yang dimiliki (Amali & Suwandi, 2021) yaitu dengan penambahan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi.

Komitmen organisasi memiliki peran penting dalam pengawasan keuangan, akuntabilitas, dan transparansi terhadap kinerja. Komitmen organisasi terhadap pengawasan keuangan mencerminkan keseriusan perusahaan dalam memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur keuangan. Jika organisasi memiliki komitmen yang kuat terhadap pengawasan keuangan, mereka akan menerapkan mekanisme pengendalian internal yang efektif, melakukan audit internal dan eksternal secara berkala, dan memastikan bahwa semua transaksi keuangan dicatat dan dilaporkan dengan benar. Dengan demikian, komitmen ini berkontribusi pada integritas dan keandalan informasi keuangan perusahaan.

Komitmen organisasi terhadap akuntabilitas mengarah pada pemenuhan tanggung jawab dan kewajiban perusahaan terhadap berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam kinerja organisasi, seperti pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan masyarakat luas. Organisasi yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap akuntabilitas akan menerapkan sistem pelaporan yang jelas dan transparan, menjaga standar etika yang tinggi, dan secara aktif berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai dengan cara yang bertanggung jawab.

Komitmen organisasi terhadap transparansi kinerja melibatkan komunikasi yang jelas dan terbuka mengenai pencapaian tujuan, kebijakan, dan hasil kinerja organisasi. Organisasi yang berkomitmen untuk menjadi transparan akan memberikan laporan kinerja yang menyeluruh kepada pemangku kepentingan, termasuk informasi tentang kinerja keuangan, pencapaian strategis, risiko yang dihadapi, dan dampak sosial dan lingkungan. Transparansi ini membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan dan memungkinkan evaluasi yang obyektif terhadap kinerja organisasi.

Secara keseluruhan, komitmen organisasi terhadap pengawasan keuangan, akuntabilitas, dan transparansi berdampak pada integritas, keandalan, dan kepercayaan yang diberikan kepada organisasi oleh pemangku kepentingan. Hal ini juga dapat meningkatkan reputasi perusahaan, memperkuat hubungan dengan pelanggan, serta membangun fondasi yang kuat untuk keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Banyuasin”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Banyuasin
2. Bagaimanakah pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Banyuasin
3. Bagaimanakah pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Banyuasin
4. Bagaimanakah pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Banyuasin

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah peneliti, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengukur pengaruh pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Banyuasin
2. Untuk mengukur pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Banyuasin
3. Untuk mengukur pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Banyuasin
4. Untuk mengukur pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Banyuasin

### **1.4 Manfaat penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat bagi penulis Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan mengenai hal yang berkaitan dengan pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah.
2. Manfaat bagi BPKAD Kabupaten Banyuasin Bagi kantor BPKAD Kabupaten Banyuasin diharapkan menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, khususnya pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*).
3. Manfaat bagi almamater hasil penelitian dapat menjadi salah satu sumber referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya penelitian yang memiliki topik relatif sama.
4. Manfaat bagi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin M.A., Sukirman, S., & Sunarno, S. (2021). Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Peran Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasional Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Kecamatan Jepara di Kabupaten Jepara). *Jurnal Studi Manajemen Bisnis*, 1(1).
- Amali, M. N., & Suwandi, E. D. (2021). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 3(6), 125–138.
- Andika, P. P. (2019). Partisipasi Anggaran, Komitmen Organisasi dan Kinerja Manajerial dengan Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi sebagai Pemoderasi. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 6(2), 13–22.
- Ardianto, S. (2018). Partisipasi Masyarakat Sebagai Solusi Bagi Problematik Implementasi Peraturan Daerah. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 193–202.
- Arfianti, D. (2021). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah SKPD Di Kabupaten Batang*. Universitas Diponegoro.
- Benawan, E. T. P., Saerang, D. P., & Pontoh, W. (2018). Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas, dan Transparansi Keuangan terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus pada Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(3), 72–79.
- Chandra, I., Defitri, S. Y., & Putri, R. D. (2022). Pengaruh Pengawasan. Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi*, 12(1).
- Chandra, J. C., Rahardjo, H., & Natalia, I. (2016). Pengaruh Preferensi Risiko Eksekutif Dan Ukuran Pe-Rusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Pertambangan. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 8(1), 1–15.
- Darmawan. (2013). Sistem Informasi Manajemen. *REMAJA ROSDAKARYA*.
- GhozaLi, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23* (8th ed.). Universitas Diponegoro.
- Halim. (2007). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemerintah Daerah : Studi kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. *Jurnal Ekonomi STIE No.2/Tahun XIII/25*.
- Herlina, H. (2021). *Pengaruh Kemampuan Sumber Daya Manusia, Lingkungan Kerja Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Keuangan Primkopal Lantamal Vi Makassar*. STIE Nobel Indonesia.
- Herscovitch, L., & Meyer, J. P. (2020). Commitment to organizational change: extension of a three-component model. *Journal of Applied Psychology*, 87(3), 474.
- Ihyaul, U. (2017). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Bumi Aksara.
- Imanni, R. N., & Witjaksono, A. D. (2018). Pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap komitmen organisasi melalui motivasi. *Jurnal Ilmu Manejmen*, 2(3), 80–94.
- Jatmiko, U. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal Sebelum dan Sesudah Pengalokasian Dana Desa. JMK. *Jurnal Manajemen Dan*

- Kewirausahaan*, 5(2), 107–121.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Lestari, U. P. (2020). Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, akuntabilitas, transparansi, good governance terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 7(1), 43–53.
- Mahsun, M., Kadratin, Y. I., & Sugiri, S. (2017). *Strategi Peningkatan Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)*. STIE Widya Wiwaha.
- Mardiana, L., Kartini, E., & Wahyullah, M. (2022). Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Laba, dan Likuiditas terhadap Kualitas Laba. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 1(3), 96–106.
- Mardiasmo, M. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Andi.
- Masela, M., Echdar, S., & Sjarlis, S. (2021). Pengaruh Komitmen Organisasi, Kepemimpinan, dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja ASN Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari. *Journal of Applied Management and Business Research (JAMBiR)*, 1(3), 234–249.
- Maulana, A., & Abbas, Y. (2021). KETERTERAPAN KONSEP COOPERATIVE COMPLIANCE PADA AKTIVITAS PENGAWASAN WAJIB PAJAK. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 8(2), 208–227.
- Muafik, M., Suyono, N. A., & Susanti, S. (2021). Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas, Transparansi Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo. *Jamasy: Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 33–39.
- Purnama, F., & Nadirsyah, N. (2016). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Aceh Barat Daya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(2), 1–15.
- Pusdiklatwas, B. P. K. P. (2007). *Akuntabilitas instansi pemerintah* (5th ed.).
- Putra, P. D. S., & Indraswarawati, S. A. P. A. (2021). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung. *Widya Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 79–92.
- Rahmawati, R., & Asmin, E. A. (2021). Motivasi, Komitmen Organisasi, Kompetensi dan Dampaknya Terhadap Kinerja Guru. *Jurnal Manajemen*, 12(1), 52–65.
- Ramadhan, A., Rahim, A. R., & Rum, M. (2020). Pengaruh kedisiplinan, motivasi, dan pengembangan diri terhadap kinerja asn pada badan pengelola keuangan dan asset daerah kabupaten mamuju. *Competitiveness*, 9(2), 124–140.
- Risdhayanti Nur Solikhah. (2016). *Pengaruh Pengawasan Internal, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada DPPKAD Kabupaten Boyolali)*. Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2008). *Perilaku Organisasi* (12th ed.). Salemba

Empat.

- Rosita, R., & Asrini, A. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Provinsi Jambi). . *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 7(1), 133–141.
- Sains, F. S. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. The New Fraud Triangle Model Dengan Perspektif Syariah Dalam Mendeteksi Perilaku Fraud. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 4(1), 21–46.
- Sanjaya, A., Rasuli, M., & Haryani, E. (2017). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi*. Universitas Riau.
- Sharma, N., & Singh, R. K. (2019). A unified model of organizational effectiveness. *Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance*, 6(2), 14–128.
- Silviani, & Irene. (2020). *Komunikasi Organisasi*. PT Scopindo.
- Solekhan, A. (2022). Pengelolaan Zakat Dalam Membangun Ekonomi Umat: Potensi Zakat Di Indonesia Dan Strategi Realisasinya. *Ikhtiyar Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 1(2).
- Sopiah. (2018). *Perilaku Organisasional*. C.V Andi Offset.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Sukandarrumidi. (2006). *Metodelogi penelitian: Petunjuk praktis untuk peneliti pemula*. Gadjah Mada University Press.
- Sule, E. T., & Saefullah, K. (2019). *Pengantar Manajemen*. Prenadamedia Group.
- Syairozi, M. I. , Pambudy, A. P., & Yaskun, M. (2021). Analisis Penerapan Good Governance dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah. *Prosiding Penelitian Pendidikan Dan Pengabdian* , 1(1), 49–59.
- Turalaki, S., Tinangon, J., & Wokas, H. (2017). Analisis Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Accountability And Transparency Effect Against Performance Public Service*, 5(2), 182–192.
- Turnip, E., & Desiana, P. M. (2023). Pengaruh Kepemimpinan Autentik Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Peran Mediasi Work Engagement dan Komitmen Afektif. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(7), 169–190.
- Ulum, M. (2020). *Analisis Sistem Pengendalian Internal Menunjang Akuntabilitas Dalam Meminimalisir Kecurangan Pada Kp-Ri Bahagia Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang*. STIE PGRI Dewantara .
- Wiguna, M. B. S., Yuniarta, G. A., & Darmawan, N. A. S. (2015). Pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 3(1).
- Yanuarisa, Y. (2020). Akuntabilitas pengelolaan keuangan yayasan yusuf arimatea palangka raya. *Balance: Media Informasi Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 90–103.